

PERILAKU MEMILIH LEMBAGA PENDIDIKAN: Prespektif teori Rational Choice dan Bounded Rational

Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si.¹

Dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam
UIN Sunan Ampel

ABSTRACT

In some these *dasarwarsa*, there is a trend change in voting behavior among the students, people tend to choose the students who used religious educational institution, is no longer always the case, they prefer the general education institutions than the religious educational institution. Especially public education institutions based on Islamic values on a purely religious institution. Changes in voting behavior of these institutions are caused by changes in the orientation of thinking among the students more rationally, not only personal, but also communal.

In education, as well as economic and political rationality that emphasizes personal interest is something natural. On the other hand, educational activities not only rely on rational individuals, but also there is a common goal to do even though sometimes sacrificing the interests of individuals or groups. The process is adaptive to the interests of the wider community, to make wholesome education for the benefit of the wider community and not just the competition of individuals or groups to maximize economic benefits.

In the theory of Rational Choice Perspective and Bounded Rational, the balance between "rational choice" and "adaptive action", making the voting behavior of students of the educational institution of society is determined. Optimal balance gives a big advantage for voters and education providers, by making the process of selecting educational institutions remain attractive for all parties. While the inability to create a balance, will make education become destructive to the interests of the community.

Keywords: Behavior Choosing, Educational Institutions, Public Pupils

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, adanya kecenderungan masyarakat santri untuk lebih memilih lembaga pendidikan umum dari pada lembaga pendidikan agama. Terutama lembaga pendidikan umum yang berbasis nilai-nilai agama dari pada lembaga pendidikan murni agama. Fenomena seperti ini hampir terjadi di seluruh masyarkat santri, di pondok pesantren didirikan berbagai jenis dan tingkatan lembaga pendidikan umum, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Padahal sebelumnya hanya mengembangkan lembaga pendidikan agama, yakni madrasah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.), Madrasah Aliyah (MA), hingga perguruan tinggi Agama Islam

(PTAI)¹. Ternyata lembaga pendidikan umum di pondok pesantren ini lebih dipilih masyarakat daripada lembaga pendidikan agama, terbukti dengan jumlah peminat dan besarnya jumlah siswa pada lembaga pendidikan umum daripada lembaga pendidikan agama.

Di kota-kota besar juga bermunculan sekolah-sekolah umum yang berbasis agama, misalnya di Surabaya ada SD, SMP, SMA Muhammadiyah, Ta'miriyah, Khadijah, Lukmanul Al Hakim, Al Falah, Insan Mulia, Al Azhar, Al Hikmah dan sebagainya;- dengan minat masyarakat yang luar biasa. Di kalangan kiyai, bahkan guru agama, dan dosen perguruan tinggi agama (misalnya UINSA) hampir tidak ada, di belakangan ini, yang menyekolahkan anaknya ke sekolah agama atau perguruan tinggi agama. Mereka lebih suka memasukan ke sekolah umum atau perguruan tinggi umum. Padahal kalau dilihat dari biaya yang harus dikeluarkan, jauh lebih besar untuk lembaga

pendidikan umum daripada pendidikan agama.

Fenomena seperti ini mengindikasikan telah terjadi pergeseran minat masyarakat santri dalam memilih lembaga pendidikan, dari pendidikan agama ke pendidikan umum. Sekarang ini, masyarakat santri lebih suka memilih pendidikan umum daripada pendidikan agama. Mengapa pergeseran memilih lembaga pendidikan terjadi pada kalangan masyarakat santri? Fenomena seperti ini cukup menarik kalau dikaji dengan menggunakan teori "pilihan rasional" dan "rasional berikat".

Dipilihnya studi perilaku memilih di kalangan masyarakat santri ini dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap terjadinya dualisme penyelenggaraan pendidikan (sekolah di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan madrasah di naungan Kementerian Agama) yang hingga kini masih belum bisa diselesaikan, padahal Undang-Undang No. 20 tahun 2003 telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan satu atap, yaitu di bawah

¹ Misalnya di Jawa timur kita bisa melihat di Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah, Bustanul Ulum, Tarbiyatut Tholabah dan Sunnan Drajad di Paciran Lamongan, Tebu Ireng dan Darul Ulum Jombang, dan sebagainya.

nauangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dualisme penyelenggaraan ini pada tataran tertentu ternyata membawa efek politis, yakni terjadinya diskriminatif dalam soal anggaran negara, dan kualitas madrasah menjadi jauh tertinggal bila dibandingkan dengan sekolah. Sementara itu dengan memperhatikan fenomena di atas, di masyarakat santri telah terjadi perubahan, yakni minat terhadap pendidikan umum semakin tinggi, ditandai dengan hadirnya pendidikan umum di pondok pesantren dan minat santri terhadap pendidikan umum yang berbasis agama jauh lebih tinggi daripada ke madrasah. Dari sini, ada kesan, terjadi kontradiktif antara kebijakan yang dikelurkan Kementerian Agama dengan pilihan masyarakat santri yang menjadi basis Kementerian Agama.

Disamping itu, hingga kini studi tentang perilaku individu dan "kelompok" dalam memilih lembaga pendidikan, terutama di kalangan masyarakat santri, dengan menggunakan teori "pilihan rasional" dan "rasionalitas berikat" tersebut

belum ada, setidaknya hingga kini penulis belum menemukan. Sehingga layak untuk menjadi bahan kajian.

KAJIAN TEORI PILIHAN RASIONAL DAN RASIONAL BERIKAT

Teori pilihan rasional pada awalnya bermula pada persoalan ekonomi yang kemudian di bawah ke persoalan politik oleh **James Buchanan** dengan² "pilihan rasional" (*rational choice*), kemudian dikembangkan oleh **Herbert Simon** dengan teori "rasionalitas berikat" (*bounded rationality*)³, bahkan kemudian masalah ekonomi dibawah ke persoalan sosiologi oleh **Gary Becker** (*human capital*) dan lebih lanjut dikembangkan oleh **James Coleman** (*social-capital*), serta **Goldthorpe**. Teori pilihan rasional merupakan salah satu dari pengaruh intelektual yang mengembangkan

² **James McGill Buchanan, Jr.** (lahir di Murfreesboro, Tennessee, 3 Oktober 1919; umur 89 tahun) ialah seorang ekonom yang memenangkan Nobel Ekonomi pada tahun 1986. Ia terkenal untuk mengembangkan "teori pilihan publik" dalam ilmu ekonomi, yang mengubah cara analisis pembuatan keputusan ekonomi dan politik bagi seorang ekonom. http://id.wikipedia.org/wiki/James_Mc.Gill_Buchanan

³ Lahir di Milwaukee, Wisconsin, pada tanggal 15 June 1916 mendapat hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1978 dan meninggal tahun 200. http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1978/simon-autobio.html. Umar Juoro, "Rasionalitas dan Adaptasi dalam Ekonomi Politik", *KOMPAS*, Opini, Rabu 18 Agustus 2004

*teori pertukaran*⁴., khususnya kecenderungannya dalam mengandaikan adanya *aktor rasional*.⁵

Prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik (juga teori utilitarian dan teori permainan; Levi *et al*, 1990; Lindenberg, 2001). Berdasarkan berbagai model yang berbeda, Friedman dan Hechter (1988) mengemukakan apa yang mereka sebut sebagai model "**skeletal**" teori

⁴ Menurut Molm dan Cook (1995; Cook dan Rice, 2001), sejarah perkembangan teori pertukaran dimulai dari akarnya, yakni behaviorisme. Behaviorisme lebih dikenal dalam ilmu psikologi, namun dalam sosiologi ia memiliki efek langsung pada sosiologi perilaku (Bushell dan Burgess, 1969; Baldwin dan Baldwin, 1986) dan efek tidak langsung, khususnya pada teori pertukaran. Sosiolog behaviorial tertarik pada **hubungan** antara sejarah reaksi lingkungan atau **konsekuensi** dengan **sifat perilaku** yang saat ini dilakukan. Konsekuensi-konsekuensi di masa lalu dari perilaku tertentu membentuk keadaan sekarang. Dengan mengetahui apa yang menimbulkan perilaku tertentu di masa lalu, kita dapat memprediksikan apakah seorang aktor akan menjalankan perilaku yang saat ini. Jadi **Imbalan** (atau dorongan) dan **ongkos** (hukuman) menjadi perhatian utama kalangan behavioris. **Imbalan** didefinisikan sebagai kemampuan memperkuat (yaitu dorongan) perilaku, sedangkan **ongkos** mengurangi kecenderungan dilakukannya suatu perilaku. George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoderen*, Edisi Terbaru, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hal.448

⁵ Namun kendati terus menerus menunjukkan pengaruh teori pilihan rasional, teori pertukaran kontemporer dipengaruhi oleh arus intelektual lain dan mulai menyebar ke sejumlah arah yang khas. Jadi, teori pilihan rasional dan teori pertukaran komplementer sama sekali tidak berdekatan. Salah satu **perbedaan** fundamental antara keduanya adalah bahwa kalau para teoritis pilihan rasional memusatkan perhatian pada pengambilan keputusan individu, unit dasar analisis teoritis pertukaran adalah relasi sosial. Akhir-akhir ini, para teoritis pertukaran lebih banyak mencurahkan perhatian pada jaringan relasi sosial, dan fokus ini cenderung menghubungkannya dengan teori jaringan itu sendiri. Teori jaringan lebih mirip dengan teori pilihan rasional, kendati menyangkut asumsi rasionalitas aktor manusia (Mizruchi, 1994). Teori-teori ini sama-sama berorientasi pada positivistik. *Ibid*, hal. 447

pilihan rasional.⁶ Gary Backer pendiri teori modal manusia (*human capital*) dan James Coleman pengarang teori modal sosial (*social-capital*) memberikan kontribusi pada teori pilihan rasional⁷.

Aktor menjadi fokus teori pilihan rasional. Aktor dipandang *sarat dengan tujuan* (atau memiliki maksud). Jadi, aktor memiliki tujuan atau sasaran tindakan mereka. Aktor juga dipandang memiliki *preferensi* (atau *nilai kepuasan*). Teori pilihan rasional tidak berurusan dengan preferensi-prefrensi dan asal usul pereferensi tersebut. Melainkan (yang terpenting adalah), fakta bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan hierarki preferensi aktor.

Teori pilihan rasional berangkat dari tujuan atau maksud aktor, dalam hal ini terdapat dua hambatan utama tindakan, yakni: kelangkaan sumber daya dan institusi sosial⁸.

⁶ *Ibid*, hal. 448.

⁷ Ben Ager, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, penerjemah Nur Hadi, Cetakan kelima, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hal 314.

⁸ George Ritzer, Douglas D. Goodman, *Teori Sosiologi...*, *Op Cid*, hal 449.

1. Kelangkaan sumber daya⁹. Aktor memiliki sumber daya berbeda sekaligus akses berbeda pada sumber daya lain. Bagi mereka yang memiliki banyak sumber daya, tercapainya tujuan mungkin saja relatif lebih mudah daripada yang tidak memiliki sumber daya. Dalam mencapai suatu tujuan, aktor harus memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan untuk tindakan terpenting selanjutnya. Aktor dapat memilih untuk tidak mengejar tujuan paling bernilai jika sumber daya yang dimiliki tidak bisa untuk itu, kesempatannya tipis, bahkan justru membahayakan peluang untuk mencapai tujuan lain yang lebih bernilai. Aktor dipandang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan mereka¹⁰, dan tujuan tersebut dapat berupa *penjajakan* hubungan antara kesempatan untuk mencapai tujuan utama dengan apa yang dilakukan oleh keberhasilan tersebut bagi peluang tercapai tujuan kedua yang paling berharga.
2. Institusi Sosial¹¹. Hambatan-hambatan institusional ini menyediakan prinsip positif atau negatif yang mendorong tindakan tertentu dan mencegah tindakan yang lain.

Friedman dan Hechter memaparkan dua gagasan lain yang mereka pandang sebagai dasar teori pilihan rasional, yakni mekanisme agregasi dan arti penting informasi dalam menetapkan pilihan rasional. Mekanisme agregasi merupakan proses ketika "tindakan-tindakan individu dikombinasikan untuk menghasilkan dampak sosial" (Friedman dan Hechter, 1988: 2003). Suatu ketika diasumsikan bahwa aktor memiliki informasi penuh, sekurang-kurangnya memadai, untuk menetapkan pilihan purposif di antara alternatif tindakan yang tersedia untuknya. Namun muncul pengakuan bahwa kuantitas atau kualitas informasi yang tersedia

⁹ Sumber daya adalah gagasan tentang *biaya kesempatan* (Friedman dan Hechter, 1988: 202). Ibid, 449.

¹⁰ Meskipun para teoritis pilihan rasional kontemporer mengakui adanya batas-batas hasrat dan kemampuan yang dapat dimaksimalkan (Heckathorn, 1997).

¹¹ Menurut Friedman dan Hechter, umumnya individu menganggap tindakan-tindakannya sejak lahir sampai mati dikendalikan oleh atauran keluarga atau sekolah; hukum dan ordinansi; kebijakan perusahaan; gereja, sinagog dan masjid; dan rumah sakit serta ruang pemakaman. Dengan membatasi kelayakan tindakan yang dapat dilakukan individu, aturan-aturan permainan yang dapat diterapkan –termasuk norma, hukum, agenda, dan aturan memilih– secara sistematis memenuhi produksi sosial (Friedman dan Hechter, 1988: 202).

sangat bervariasi dan keragaman tersebut membawa dampak besar pada pilihan aktor (Heckathorn, 1997).¹² Berikut beberapa teori pilihan rasional:

1. TEORI PILIHAN RASIONAL (*RATIONAL CHOICE*) JAMES BUCHANAN

James Buchanan, seorang ahli ekonomi, memberikan penjelasan teoritik dan menonjolnya kepentingan pribadi, kelompok, atau partai dalam dunia politik. Ia telah memasukkan unsur-unsur pertimbangan ekonomis dalam perilaku para politikus yang kemudian dikenal sebagai "Teori Pilihan Rasional" (*Rational Choice*). Teorinya ini kemudian juga dianggap melahirkan disiplin ilmu ekonomi-politik.¹³

James Buchanan mengungkapkan pendapat umum terhadap politisi, bahwa mereka sebenarnya memperjuangkan kepentingannya sendiri atau kelompok, dan bukan pada kepentingan masyarakat luas¹⁴.

Perjuangan kepentingan individu para politikus tersebut di samping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakilinya, bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.¹⁵

Teori ini sebenarnya mirip dengan teori ekonomi klasik yang pertama kali dikemukakan oleh bapak ilmu ekonomi **Adam Smith**. **Smith** juga mengatakan bahwa pemerintah tidak usah repot-repot mengatur masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, karena individu-individu dalam masyarakat akan memperjuangkan kepentingan ekonominya sendiri-sendiri. Perjuangan kepentingan ekonomi individu-individu itu di samping menciptakan persaingan, juga menciptakan ketergantungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.¹⁶

Untuk memperjelas hal tersebut, Adam Smith menulis begini: "... Jika seorang membuat roti untuk dijual kepada orang lain,

¹² Ibid, hal, 449.

¹³ Nugroho SBM, "Memahami Perilaku Politik lewat Teori Ekonomi Politik", *SUARA MERDEKA*, Wacana, Kamis, 16 September 2004

¹⁴ Umar Juoro, "Rasionalitas...", *Loc Cid*.

¹⁵ Astar Hadi, "Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theori*): sebuah telaah Ekonomi-Politik", 11 Desember 2007

¹⁶ Nugroho SBM, "Memahami...", *Loc Cid*.

maka motivasinya bukan karena ia orang baik hati yang tak ingin melihat orang lain kelaparan, melainkan karena ia sendiri butuh uang untuk makan yang bisa ia dapat dengan membuat dan menjual roti itu."¹⁷

Dalam perkembangannya, memang banyak yang tidak setuju dengan pandangan Buchanan ini. Fakta membuktikan bahwa perjuangan kepentingan pribadi para politikus tersebut seolah tanpa batas dan jarang sekali yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Persoalannya kemudian apakah yang dimaksimalkan itu hanya ekonomi saja? Kenyataan menunjukkan bahwa yang dimaksimalkan tidak hanya kepentingan ekonomi, tetapi juga prestise dan kekuasaan (*need of power*)¹⁸.

2. RASIONAL TERBATAS (BOUNDED RATIONALITY)

HERBERT SIMON

Lalu, apakah benar bahwa individu benar-benar otonom dalam

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Prof. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D. *Catataan Kuliah...*, *Loc Cid*.

menentukan pilihan yang rasional? **Herbert Simon** dengan teori "rasional berikat" (*Bounded Rationality*) menegaskan bahwa pilihan rasional ini tidak hanya berada dalam ruang kosong, pilihan rasional ini berada dalam konteks ruang dan waktu tertentu¹⁹.

Dalam teori yang melingkupi bahkan menyangkal teori Buchanan ini, Herbert Simon menyatakan bahwa pilihan rasional para politikus yang memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan lebih utama dari kepentingan masyarakat akan secara otomatis atau alamiah dibatasi. Pembatas dari pilihan rasional para politikus berupa motivasi kepentingan pribadi adalah kenyataan bahwa masyarakat ternyata selalu ikut mengawasi perilaku para politikus dan tak segan-segan memberi "hukuman" jika memandang perilaku mementingkan diri sendiri dari para politikus itu sudah keterlaluan.²⁰

¹⁹ Umar Juoro, "Rasionalitas dan Adaptasi ...", *Loc Cid*.

²⁰ Bentuk hukuman publik yang paling biasa adalah tidak memilih lagi si politikus itu pada pemilihan umum berikutnya (tidak simpati). Oleh karena itu, menurut Herbert, dalam kenyataannya si politikus akan mencoba mencari keseimbangan antara memperjuangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat umum, khususnya yang mereka wakili atau yang memilih mereka. Nugroho SBM, "Memahami...", *Loc Cid*.

Teori "rasionalitas berikat" (*bounded rationality*) yang dikembangkan **Herbert Simon** dapat membantu menjelaskan motivasi individu dalam masyarakat bukan semata-mata rasional dalam memaksimalkan kepentingannya, tetapi juga bersifat menyesuaikan (adaptif) terhadap apa yang menjadi kehendak masyarakat lebih luas, meski hal ini tidak sepenuhnya untuk kepentingan pribadi. Begitu pula perkembangan institusi sosial bersifat adaptif terhadap perkembangan baru. Selanjutnya, dalam kegiatan ekonomi, tindakan adaptif yang kooperatif sering lebih baik hasilnya daripada sekadar memaksimalkan kepentingan individu.

3. PILIHAN RASIONAL DALAM KEBIJAKAN

Teori pilihan rasional dalam perkembangannya tidak hanya digunakan untuk menjelaskan "*perilaku memilih*", namun juga dalam "*pengambilan kebijakan*".

Di berbagai negara pengaruh aktor-aktor elite dalam proses pembuatan kebijakan sangat kental. Aktor-aktor tersebut dapat berasal

dari institusi formal, seperti: lembaga legislatif dan/atau eksekutif, ataupun dari noninstitusional, seperti kelompok kepentingan dan partai politik. Mereka melakukan sharing power dalam tatar yang paling fundamental tetapi tidak terjadi dalam tataran empiris.²¹

Wright Mills, dalam bukunya *The Power Elite* (1959) mengemukakan bahwa menurut perspektif teori elite, kebijaksanaan (atau bahkan) kebijakan publik dapat dipandang sebagai nilai-nilai dan pilihan-pilihan dari elite yang memerintah. Argumentasi pokok dari teori elite ini adalah bukan rakyat yang menentukan kebijaksanaan (atau kebijakan) publik melalui tuntutan-tuntutan dan tindakan mereka, tetapi elite yang memerintah dan dilaksanakan pejabat-pejabat dan badan-badan pemerintah.²²

Proses pembuatan kebijakan oleh aktor-aktor elite tersebut didasarkan pada empat jenis pandangan yang digunakan sebagai preferensi birokrasi dalam memformulasikan suatu kebijakan (Grindle dan Thomas, 1991), yaitu:

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

(1) saran-saran teknis dari teknokrat, ahli-ahli internasional; (2) implikasi birokratik, berupa sasaran karier individual, posisi kompetisi dalam suatu unit; (3) stabilitas dan dukungan politik, seperti stabilitas dalam sistem politik, perhitungan biaya dan manfaat terhadap kelompok kepentingan dan adanya dukungan militer terhadap kelompok oposisi. Aktor-aktor berpengaruh terhadap posisi aktor-aktor kunci dalam pembuatan kebijakan di sini adalah pemimpin-pemimpin politik, elite ekonomi dominan, pemimpin militer, dan pemimpin kelompok kepentingan; dan (4) tekanan internasional, mencakup akses pada pendanaan dan perdagangan internasional.²³

Oleh karena itu, pilihan terhadap nilai-nilai tertentu sebelum kebijakan diputuskan melalui perspektif elite lebih sering muncul daripada nilai-nilai tertentu yang dikehendaki oleh publik sebagai pemangku kedaulatan. Sehingga yang terjadi, kebijakan-kebijakan publik yang tidak sensitif "publik" justru diprioritaskan.

Pilihan-pilihan itu semua berdasar pada pilihan-pilihan rasional elite yang seringkali bertentangan dengan pilihan-pilihan nilai kebutuhan dan keinginan publik. Bila demikian halnya, maka paradoks kebijakan publik — yang mempertentangkan kebutuhan akan demokratisasi dan kepentingan birokrasi —. Teori pilhan rasional seringkali hanya mencerminkan kepentingan pribadi dan golongan tanpa diimbangi dengan memasukkan kepentingan masyarakat yang dalam hitungan pilihan rasional dianggap sebagai bentuk inefisiensi.²⁴ Disinilah letak kelemahan teori pilihan rasional, yang akan bisa terselesaikan bila diterapkan teori "rasional berikat", dimana individu dan golongan bersedia melakukan adaptasi dengan kepentingan masyarakat secara rasional. Dengan cara seperti ini, semua diuntungkan.

4. TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S. COLEMAN

Menurut James S. Coleman, teori pilihan rasional

²³ *Ibid*

²⁴ Astar Hadi, "Teori Pilihan Rasional...." *Loc Cid*.

(Coleman menyebut "paradigma tindakan rasional", 1989:5) merupakan salah satu teori yang berpeluang menghasilkan integrasi paradigmatis. Pendekatan ini berorientasi dari *basis individualisme* metodologis dan menggunakan *teori pilihan rasional* sebagai **basis level mikro** untuk menjaskan **fenomena level makro**.²⁵ Bahkan dalam buku *Foundations of Social Theory* (1990) James Coleman menyingkat agenda pilihan rasional, memutar teori Backer tentang human capital (1980, 1981, 1996), yang memperluas teori ekonomi kepada penjelasan pembagian kerja pada rumah tangga, kedalam kerangka kerja sosiologis yang lebih eksplisit, yang dalam istilah *human capital* disebut "social capital"²⁶.

²⁵ Jurnal *Rationality and Society* edisi pertama. Sebagian besar karya sosiologi dikesampingkan dari jurnal *Rationality and Society*, yang tidak dikesampingkan adalah persoalan level makro dan kaitannya dengan tindakan rasional. Pertimbangannya, selain persoalan akademis, Coleman juga ingin agar karya yang dikerjakan dengan perpektif pilihan rasional memiliki relevansi praktis bagi dunia social kita yang terus berubah. Sebagai contoh, Heckathorn dan Broadhead (1996) menelaah isu kebijakan public yang ditujukan untuk menjaga AIDS dari perspektif pilihan rasional. Ibid, hal 477-478.

²⁶ Dalam konteks ini, teori pilihan rasional menjadi relevan karena tiga alasan: *Pertama*, konstruksinya, berlawanan dengan konstruksi Marxisme pada level dasar pemahaman mereka atas perilaku manusia. *Kedua*, dengan mengekonomikan sosiologi, Backer dan Coleman memaparkan penekanan Marxism pada pentingnya ekonomi. *Ketiga*, masuknya teori ekonomi kedalam sosiologi meningkatkan status disiplin sosiologi dengan mengadopsi konsep dari disiplin ekonomi yang lebih prestisius dan lebih "berat". Ini dianggap sebagai strategi bertahan hidup pada saat jurusan sosiologi menderita karena pengelolanya

Coleman berargumen, bahwa sosiologi seharusnya memusatkan perhatian pada sistem sosial, namun fenomena makro tersebut harus dijelaskan oleh faktor yang ada di dalamnya, dengan individu sebagai prototipenya. Ada beberapa alasan, termasuk fakta, yakni: (a) bahwa biasanya data dikumpulkan pada level individu dan selanjutnya dikumpulkan atau disusun agar berkembang pada level sistem, (b) diantara alasan memilih pada level individu adalah bahwa individulah tempat "intervensi"²⁷ pada awalnya dilakukan untuk menciptakan perubahan sosial.

Berdasarkan fokus yang diarahkan pada individu ini, Coleman mengaku bahwa ia adalah seorang metodolog individualis, meskipun ia melihat perspektif yang dikemukakannya sebagai "varian spesial". Pandangannya *spesial*, karena ia menerima gagasan tentang kemunculan dan kendati berfokus

menganggap mereka telah surut ke era 1960-an, ketika sosiolog ambi bagian dalam gerakan sosial dalam melakukan penelitian advokasi. Teori pilihan rasional menjadi serangan terbaru atas golongan kiri dalam sosiologi. Ben Ager, Teori Sosial Kritis...*Op Cid*, hal 315

²⁷ Inti dari perspektif Coleman adalah gagasan bahwa teori sosial bukan sekedar latihan akademis namun seharusnya mempengaruhi dunia sosial melalui "intervensi". Ibid, hal: 479.

pada faktor-faktor yang menjadi bagian sistem, faktor-faktor tersebut bukan serta-merta merupakan orientasi dan tindakan individu. Jadi, fenomena level mikro selain individu (yakni "kelompok") dapat menjadi fokus analisis ini.²⁸

Orientasi pilihan rasional Coleman jelas pada **gagasan dasarnya**, yakni bahwa "*orang bertindak secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan, dengan tujuan (dan tindakan) yang dibangun oleh nilai atau preferensi*" (1990b:13). Namun kemudian Coleman (1990b: 14) berargumen bahwa untuk sebagian besar tujuan teoritis, ia akan memerlukan konseptualisasi yang lebih tepat terkait dengan "**aktor rasional**" yang berasal dari ilmu ekonomi, yakni konsep yang melihat aktor memilih tindakan-tindakan yang akan memaksimalkan keuntungan, atau pemusatan kebutuhan dan keinginan.²⁹

Terdapat **dua kunci** dalam teori pilihan rasional Coleman, yakni **aktor** dan **sumber daya**. *Aktor* adalah individu atau kelompok yang melakukan tindakan, yang

menginginkan sesuatu. *Sumberdaya* adalah hal-hal yang dikendalikan aktor dan yang diinginkannya. Berdasarkan dua elemen ini, interaksi keduanya mengarah pada level sistem.

Teoritis pilihan rasional menyatakan, bahwa perilaku sosial dapat dijelaskan dalam istilah "**perhitungan**" rasional yang dilakukan individu dalam berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka. Ini adalah logika dasar teori ekonomi kapitalis, yang menjabarkan apa yang terjadi ketika dengan sumber daya terbatas ditempatkan dalam suatu pasar ekonomi. Ekonom menteorikan bahwa individu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan melalui strategi investasi dan konsumsi.³⁰

Teori pilihan rasional tidak hanya mengabaikan masalah sosial, namun juga melacak masalah ini pada **pilihan rasional** manusia atau pada aspek **irasionalitas** yang bisa berasal dari orang yang tidak banyak memiliki informasi tentang pilihan yang tersedia bagi mereka atau karena ketidaksensitifan mereka atas

²⁸ Ibid, hal. 480.

²⁹ Ibid, hal 480.

³⁰ Ben Ager, *Teori Sosial Kritis...*, *Op Cid*, hal: 316.

konsekuensi jangka panjang dari keputusan jangka pendek.³¹

Teoritis pilihan rasional bukan hanya menolak pandangan tentang **eksploitasi** dan **dominasi**, mereka juga menentang keseluruhan konsep **struktur sosial** yang ada, selain di dalam atau di atas kepala individu, karena mereka menjelaskan perilaku individu dalam hal pilihan rasional. Ini menghapuskan kebutuhan bagi teori Marxisme dan mengatasi masalah mikro-makro yang telah menjadi begitu populer sejak masa Parson. Akibatnya, penjelasan level makro dapat direduksi menjadi pengambilan keputusan pada level mikro, yang dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan secara rasional.³²

Meskipun meyakini teori pilihan rasional, Coleman tidak percaya bahwa perspektif ini, paling tidak sejauh ini, memiliki semua

jawaban³³. Namun jelas ia percaya bahwa ia dapat bergerak ke arah itu, karena "keberhasilan teori sosial yang didasarkan pada rasionalitas terletak pada keberhasilannya penyempitan ranah aktivitas sosial yang tidak dapat dijelaskan oleh teori tersebut" (Coleman, 1990b: 18).

Dari sini menunjukkan bahwa, -berangkat dari tindakan rasional individu-, fokus Coleman dalam masalah mikro-makro adalah kaitan mikro dengan makro, atau bagaimana gabungan tindakan individu-individu melahirkan perilaku sistem, atau bagaimana sistem menghambat orientasi aktor. Akhirnya ia berminat pada aspek mikro-makro hubungan, atau dampak tindakan individu pada tindakan individu yang lain.

Ada tiga kelemahan utama pendekatan Coleman. *Pertama*, ia lebih memprioritaskan isu mikro ke makro, sehingga sedikit mengabaikan hubungan lain. *Kedua*, ia mengabaikan isu makro-makro.

³¹ Misalnya, seorang alkoholik yang sedang minum mungkin berperilaku rasional jika pada satu pesta cocktail yang ditimpuk oleh bosnya, dimana minum sudah menjadi norma yang berlaku bagi semua pekerja. Namun dalam jangka panjang pekerjaan alkoholik itu mungkin akan dalam bahaya jika dia jatuh dari kendaraan. Ibid, hal: 317.

³² Misalnya, fakta bahwa perempuan memperoleh penghasilan hanya 70% dari penghasilan laki-laki di Amerika Serikat tidak mencerminkan satu program eksplisit atau doktrin seksisme laki-laki, namun hanya merupakan efek agregat dari pilihan rasional pasangan tentang bagaimana pasangan yang lebih "layak jual" seharusnya meninggalkan semua pekerjaan domestic. Ibid, hal: 318.

³³ Coleman mengakui bahwa di dunia nyata orang tidak selalu bertindak rasional, namun ia merasa bahwa hal itu tidak banyak membawa perbedaan dalam teorinya: "Asumsi implisit saya adalah bahwa prediksi teoritis yang dikemukakan di sini pada dasarnya tidak membedakan apakah actor bertindak menurut rasionalitas sebagaimana yang umum dipahami atau menyimpang dari yang telah diamati" (1990b: 506; Inbar, 1996). George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi..., *Op Cid*. Hal: 480.

Ketiga, panah kausalnya hanya menuju satu arah; dengan kata lain, ia mengabaikan hubungan dialektis antar dan antara fenomena mikro dengan makro³⁴.

Coleman bersikap kritis pada sebagian besar teori sosial karena mengadopsi label *homo sociologicus*. Perspektif ini menekankan proses sosialisasi dan kaitan erat antara individu dengan masyarakat. Dengan demikian, *homo sociologicus* tidak mampu berbicara tentang kebebasan individu untuk bertindak seperti yang mereka kehendaki di tengah-tengah hambatan yang mereka temukan. Terlebih lagi, perspektif ini miskin kemampuan untuk mengevaluasi tindakan sistem sosial. Sebaliknya, *homo economicus*, menurut pandangan Coleman, memiliki semua kapasitas tersebut.

Pandangan Coleman tentang teori sosial terkait erat dengan pandangannya tentang perubahan hakikat masyarakat. Hilangnya struktur primordial dan digantikannya oleh struktur bertujuan telah meninggalkan sejumlah lubang yang belum sepenuhnya diisi

kembali oleh organisasi sosial baru. Teori sosial dan ilmu sosial pada umumnya diperlukan oleh kebutuhan untuk merekonstruksi masyarakat baru (Coleman, 1993a, 1993b; Bulmer, 1996). Tujuannya bukanlah untuk menghancurkan struktur bertujuan namun mewujudkan peluang dan menghindari masalah dalam struktur tersebut. Masyarakat baru memerlukan ilmu sosial baru. Kaitan antara wilayah institusional berubah, dan akibatnya ilmu sosial harus berniat menerobos batas-batas disipliner tradisional.³⁵

5. GOLDTHORPE

Goldthorpe, salah satu peneliti terkenal di bidang mobilitas social di beberapa dekade terakhir ini, dalam artikelnya berargumen betapa pentingnya memantapkan ikatan yang lebih dekat antara teori pilihan rasional dan tipe dari analisis statistik yang sebagian besar para peneliti pergerakan social banyak menggunakannya³⁶. Banyak peneliti lain yang mengikuti jalur dari **Goldthorpe** dan kini, teori pilihan

³⁵ Ibid, hal 484.

³⁶ J. Goldthorpe, "The quantitative Analysis of large-scale data-sets and rational action theory: for a sociological alliance". *European Sociological Review* 12.(1998: 26-109).

³⁴ Ibid, hal 480-481.

rasional cenderung berpusat pada komunitas penelitian **Goldthorpe** ini³⁷.

Bren dan **Goldthorpe** (1997) misalnya, telah mengembangkan suatu model formal yang bertujuan untuk menjelaskan perbedaan kelas didalam memperoleh pendidikan yang diasumsikan bahwa keluarga dari kelas yang berbeda juga mengembangkan strategi yang berbeda yang berusaha untuk meminimalkan resiko terjadinya mobilitas social kebawah terhadap kelas social mereka. Model ini telah memunculkan banyak penelitian empiris (contohnya ; Becker, 2003; Davies, Heinesen dan Holm, 2002; Need dan de Jong, 2001)³⁸.

Dari berbagai teori tersebut, nampaknya pilihan rasional (*rational choice*) James Coleman dan rasional berikat (*Bounded Rationality*) Herbert Simon, serta Goldthorpe lebih tepat untuk

menganalisi perilaku memilih masyarakat santri dalam pendidikan.

C. ANALISIS TERHADAP PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT SANTRI DALAM PENDIDIKAN

James Coleman mengembangkan teori pilihan rasional dengan unit analisis level mikro ke makro³⁹. Yang menarik James Coleman tidak hanya individu sebagai alat analisisnya, namun juga lainnya (yakni individu-individu dalam kelompok⁴⁰). Terdapat **dua kunci** dalam teori pilihan rasional Coleman, yakni *aktor* dan *sumber daya*. *Aktor* adalah individu atau kelompok yang melakukan tindakan, yang menginginkan sesuatu. *Sumberdaya* adalah hal-hal yang dikendalikan aktor dan yang diinginkannya⁴¹.

Bagi **James Coloman**, Individu sebagai aktor yang otonom, dalam memilih tidak mempersoalkan apakah benar-benar

³⁷ S. Morgan, "Modelling Preparatory Commitment and Non-Repeatable Decisions: Information-Processing, Preference Formation and Educational Attainment". *Rationality and Society* 14, (2005:387-429)

³⁸ Peter Hedstrom, Charlotta Stern, "Rational Choice and Sociology". *Journal the New Palgrave Dictionary of Economics*. (Second Edition, 2008;7).

³⁹ Pada awalnya James Coleman memutar teori Backer tentang human capital, memperluas teori ekonomi kepada penjelasan pembagian kerja pada rumah tangga, ke dalam kerangka kerja sosiologis yang lebih eksplisit, yang dalam istilah *human capital* disebut *social capital*. Ben Agger "Teori Sosial Kritis...", *Op Cid*, hal 314-315.

⁴⁰ Menurut George Ritzer fenomena level mikro selain individu dapat menjadi focus analisis teori pilihan rasional. George Ritzer, Douglas J. Goodman, "Teori Sosial ...", *Op Cid*, hal 480.

⁴¹ *Ibid*, hal 480.

rasional⁴² atau tidak, yang penting individu telah menjatuhkan pilihan menurut pertimbangan pertimbangannya sendiri. Aktor dipandang *sarat dengan tujuan* (atau memiliki maksud). Jadi, aktor memiliki tujuan atau sasaran tindakan mereka. Aktor juga dipandang memiliki *preferensi* (atau *nilai kepuasan*). Teori pilihan rasional tidak berurusan dengan preferensi-preferensi dan asal usul preferensi tersebut. Melainkan (yang terpenting adalah), fakta bahwa **tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan** yang konsisten dengan hierarki preferensi aktor⁴³.

Dalam hal ini individu dan kelompok (korporat) sebagai aktor selalu memperhitungkan untung dan rugi, berusaha untuk memaksimalkan keuntungan (materi, prestise dan kekuasaan), dan meminimalisir kerugian-kerugiannya.

Pada kenyataannya, individu dan korporat melakukan langkah-langkah yang menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat, sehingga teori "rasionalitas berikat" (*bounded rationality*) yang

dikembangkan **Herbert Simon** dapat digunakan untuk menganalisis persoalan sosiologi. Teori "Rasionalitas berikat" dapat membantu menjelaskan motivasi individu dalam masyarakat bukan semata-mata rasional dalam memaksimalkan kepentingannya, tetapi juga bersifat menyesuaikan (adaptif) terhadap apa yang menjadi kehendak masyarakat lebih luas, meski hal ini tidak sepenuhnya untuk kepentingan pribadi.

Kajian berikut berupaya menggunakan teori "pilihan rasional" James Coleman dan teori "rasionalitas berikat" Herbert Simon untuk menganalisis perilaku individu santri dan kelompok santri dalam memilih lembaga pendidikan umum. Serta teori "pilihan rasional" James Buchanan dan teori "rasionalitas berikat" Herbert Simon untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau "pengelola" pendidikan.

1. PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT SANTRI TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN

⁴² Ibid,

⁴³ Ibid, hal 448

Meskipun teori pilihan rasional Coleman tidak berurusan dengan *preferensi* (nilai kepuasan) dan asul-asul preferensi tersebut, namun penulis memandang penting untuk menganalisis preferensi-preferensi tersebut beserta asal usulnya, justru ini yang menarik untuk dikaji sekaligus pembeda dengan teori pilihan rasional James S. Coleman. Sedangkan teori "Rasional Berikat" dipakai, karena kenyataannya individu dan korporat juga berusaha melakukan adaptasi dengan kehendak masyarakat, agar tujuannya tercapai, dan terjadi "kesetabilan". Sudah tentu adaptasi yang dilakukan oleh aktor (individu dan korporat) juga memperhatikan untung dan rugi tidak hanya bagi dirinya (sekalipun kepentingan individu lebih dimaksimalkan, kepentingan korporat juga diperhatikan).

Adanya kecenderungan masyarakat santri untuk lebih memilih lembaga pendidikan umum dari pada lembaga pendidikan agama, merupakan fenomena umum. Terutama lembaga pendidikan umum yang berbasis nilai-nilai agama dari pada lembaga pendidikan murni

agama. Padahal biaya yang harus dikeluarkan ke pendidikan umum jauh lebih besar bila dibandingkan ke pendidikan agama.

Dalam pendidikan, sebagaimana ekonomi dan politik, rasionalitas yang menekankan kepentingan pribadi adalah sesuatu yang wajar. Di lain pihak, kegiatan pendidikan tidak hanya bergantung pada individu-individu yang rasional, tetapi juga ada tujuan bersama yang harus dilakukan meski kadang mengorbankan kepentingan individu atau kelompok. Proses adaptif terhadap kepentingan masyarakat lebih luas, menjadikan pendidikan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat lebih luas, bukan sekadar persaingan individu atau kelompok untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi.

Dalam keseimbangan antara "pilihan rasional" dan "tindakan adaptif" inilah perubahan pendidikan di pondok pesantren amat bergantung. Keseimbangan optimal akan memberi keuntungan besar bagi pemilih dan penyelenggara pendidikan dengan membuat proses pemilihan lembaga pendidikan tetap menarik bagi semua pihak

(masyarakat dan pengelola pesantren/lembaga pendidikan). Sedangkan ketidakmampuan menciptakan keseimbangan akan membuat pendidikan menjadi destruktif bagi kepentingan masyarakat.

Pondok pesantren (menurut James Coleman sebagai korporat) juga melakukan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, yakni dengan mendirikannya lembaga pendidikan umum, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, kebijakan ini diambil sebagai upaya peningkatan peran serta pondok pesantren dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang tidak hanya saleh, tetapi juga memiliki skil tinggi. Sementara itu masyarakat kini juga membutuhkan tenaga yang memiliki integritas skil dan kesalehan.

Tingginya biaya yang harus dikeluarkan, adalah konsekwensi logis dari penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu, sehingga masyarakat masih memilih lembaga pendidikan umum tersebut. Sebagai korporat, pondok pesantren juga semakin menyukai untuk membuka lembaga pendidikan

umum, tidak hanya karena pertimbangan peminat besar, tetapi juga secara ekonomis dan politis lebih menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh pengelola pondok pesantren tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari pemerintah. Keuntungan dari masyarakat diperoleh dengan semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke sekolah umum di pondok pesantren (tidak hanya kelas ekonomi bawah dan menengah, namun juga atas). Sedangkan dari pemerintah pengelola pondok pesantren juga akan memperoleh keuntungan dengan diberinya subsidi anggaran penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah (diknas). Sedangkan secara politik, dari pondok pesantren bisa dilahirkan kader-kader yang siap berkiprah dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari tenaga kerja hingga pejabat publik yang menentuka kebijakan.

Di sinilah mulai ada redefinisi pemahaman dikalangan masyarakat santri tentang konsep "*Lillahi Taala*", dari "seikhlasnya" , menjadi perhitungan untung rugi secara ekonomi dan politis. Pilihan

yang dilakukan oleh masyarakat santri merupakan pilihan rasional yang tidak hanya memperhatikan dimensi ritual, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi dan politik.

2. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Secara filosofis, kata “mencerdaskan kehidupan”, paling tidak, dapat diartikan sebagai sebuah upaya membangun –meminjam istilah **Paulo Freire**— kesadaran kritis masyarakat terhadap dinamika kehidupan yang sangat kompleks.

Kesadaran kritis pendidikan, tentu saja, merupakan manifestasi *learning process* yang mengandaikan sebuah kesinambungan tiga fokus “kesadaran” yang melekat dalam diri manusia, yaitu: *thinking* (berpikir), *feeling* (merasa) dan *doing* (melakukan). Pendidikan, dengan demikian, memosisikan dirinya tidak saja sebagai lokus berpikir secara kritis, ia juga melibatkan unsur-unsur sensitivitas (merasa) dalam bentuk keberpihakan terhadap

kebenaran dan membangun aktivitas-kreatif (kerja) untuk menjalankan roda kehidupan/kebudayaan.⁴⁴

Ketiga unsur “kesadaran” tersebut menuntut sebuah ruang yang kita sebut pendidikan. Lantas apakah ruang yang kita sebut pendidikan tersebut sudah memenuhi tanggung-jawabnya untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan atau mencipta “kesadaran kritis”? Atau, apakah pendidikan itu justru telah memperangkap kita dalam jejaring sistemik pendidikan yang akhir-akhir ini membuat banyak orang tua di Indonesia merasa ngeri untuk sekadar memikirkan dana yang harus dibayarkannya?

a. Pseudo Pendidikan

Secara tradisional, menurut James E. Alt dan Alberto Alesina (1996), perilaku ekonomi berarti orang yang memaksimalkan nilai tukar sedangkan perilaku politik menyangkut pemberian suara dan bergabung dengan kelompok kepentingan. Eksistensi paralel dan eksistensi bersama “negara” dan “pasar” dalam dunia modern ini melahirkan apa yang dinamakan

⁴⁴ Astar Hadi, "Pendidikan atau "Toko" Pendidikan?", <http://astarhadi.blogspot.com/2007/12/Pendidikan-atau-toko-pendidikan.html>. 28 Desember 2007

“ekonomi politik”. Dalam hal ini, pendidikan dibangun atas dasar hegemoni elit kekuasaan yang ditopang oleh pemerintah dan pengusaha. Kebijakan-kebijakan yang diambil –termasuk kebijakan pendidikan— menjadi milik “bersama” dua kekuatan tersebut.

Fakta-fakta akan tingginya biaya pendidikan sudah sering kita dengar melalui keluhan-keluhan masyarakat atau ekspos media massa. Seperti jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 13-14 Juni 2007 mengenai persiapan tahun ajaran baru, menunjukkan bahwa dari rekam pendapat yang dilakukan, tidak sedikit orang tua yang merasa gamang terhadap kondisi pendidikan saat ini. Keresahan orang tua terhadap beban biaya pendidikan akan sangat sulit apabila disandingkan dengan keinginan untuk memperoleh kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak mereka⁴⁵.

Artinya, kebijakan wajib belajar (wajib) sembilan tahun yang sejatinya menjadi hak setiap warga bangsa hanya dikapling oleh mereka-

mereka yang punya cukup duit. Ini menjadi bukti bahwa pendidikan telah dimasuki unsur-unsur kebijakan ekonomi-politik yang hanya manandakan sebuah komodifikasi sistem pendidikan menjadi semacam produk barang dan jasa.

Pendidikan mengalami pembelokan makna ke arah permainan tanda komoditas yang saling jalin-menjalin dalam wujud pseudo knowledge (ilmu pengetahuan semu/palsu) yang diatur oleh mekanisme pasar. Alih-alih, menghasilkan kebudayaan, ia justru menciptakan bibit-bibit baru sebuah generasi yang terjebak dalam perangkap logika etalase toko (kapitalisme) yang oleh Jean Baudrillard –seorang Posmodernis asal Perancis— dianggap sebagai *the system of object*.

Dengan kata lain, pendidikan bisa diibaratkan sebagai sebuah etalase toko/mall yang menjadi objek representasi nilai, gaya hidup, sistem citra yang harus dikonsumsi oleh masyarakat –konsumen bukan pelajar— melalui aktivitas transaksional terhadap produk-produk (gelar akademik) yang ada di dalam ”toko” pendidikan

⁴⁵ Kompas, 13 Juli 2007

tersebut. Masyarakat dipaksa oleh kekuatan sebuah sistem (pendidikan) untuk membeli "aksesoris-aksesoris" yang ada sebagai tanda bahwa ia layak menjadi "manusia berpendidikan". Dalam sistem ini, akan memunculkan lingkaran setan konsumerisme, di mana seseorang yang sebelumnya hanya berniat membeli satu produk, katakanlah sebuah baju, tentu saja dalam priode tertentu dia juga dipaksa membeli pelengkap yang lain seperti gelang, cincin, celana, dan lain-lain, sebagai pemanis (citra) dirinya.

Dengan kata lain, gerak dinamis kesadaran kritis yang ditopang oleh unsur *knowing by thinking, feeling and by doing*, tidak akan pernah muncul jika saja logika pemenuhan *financial capital* (modal finansial) sebagai sistem kerjanya. Pun demikian, objektivikasi pasar dalam pendidikan hanya akan menjadikannya sebatas komoditas objek komersialisme ilmu pengetahuan.

b. Pendidikan untuk Memiskinkan

Fenomena-fenomena tentang mahalnya biaya pendidikan yang banyak dikeluhkan oleh

masyarakat sendiri, kritik di media massa, dan lain-lain, menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia belum menyentuh aspek *pro-poor policy* (kebijakan pro-rakyat miskin) yang telah banyak diwacanakan. Padahal konstitusi negeri ini mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa negara wajib menjamin pendidikan warganya. Untuk pendidikan dasar, pendanaan pendidikan dasar sepenuhnya menjadi kewajiban pemerintah. Hal ini tercantum dalam Pasal 31, Ayat 1 dan 2, mengenai hak warga negara memperoleh pendidikan dan pembiayaan pendidikan dasar oleh negara.

Ironisnya, wajib belajar sembilan tahun yang diamanatkan UUD 1945 masih sebatas wacana. Pendidikan yang "terlanjur" menitikberatkan pada model ekonomi politik, pada akhirnya, melihat kebijakan yang seharusnya untuk kepentingan publik (rakyat) direduksi menjadi kepentingan pasar. Pendidikan dipolitisi untuk kepentingan sekelompok elit yang memiliki kuasa terhadap beroperasinya pendidikan itu sendiri.

Yang muncul kemudian, kompetisi antar lembaga pendidikan adalah kompetisi pasar yang menyodorkan iklan-iklan pendidikan yang memaksa konsumen untuk membelinya meski dengan harga yang sangat tinggi sekalipun. Konsekuensinya, tidak ada jatah pendidikan untuk kaum miskin!⁴⁶

Pelajaran yang mungkin dapat kita petik dari benang kusut pendidikan yang kapitalistik ini adalah isyarat matinya pendidikan untuk peradaban dan keadaban. Peradaban dan keadaban, bagaimanapun, tidak akan pernah lahir dari praktek kapitalisme pendidikan yang ujung-ujungnya menciptakan mentalitas korup. Hanya melalui pendidikan yang "membebaskan", "memanusiakan", "berkeadilan" dan tidak diskriminatif, Indonesia kita akan mampu melahirkan sosok generasi penerus bangsa⁴⁷.

c. Biaya Pendidikan dan Kualitas Pendidikan

Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan, masyarakat

lebih memilih lembaga pendidikan yang biayanya "lebih besar". Terutama di beberapa kota (tidak hanya kota besar), dan di lingkungan pondok pesantren yang menyediakan sekolah umum dengan biaya lebih besar daripada sekolah agama. Padahal tidak seluruhnya para orang tua tersebut berstatus ekonomi menengah ke atas (bahkan ada yang sebenarnya tidak mampu membayar penuh biaya di sekolah tersebut)⁴⁸. Setidak-tidaknya, masyarakat seperti ini mengasumsikan, bahwa ada korelasi antara besarnya biaya dengan tingginya kualitas pendidikan di sekolah. Dengan biaya yang lebih besar, kegiatan pembelajaran lebih berfariatif dan lebih berkualitas. Masyarakat lebih yakin jaminan kualitas pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan biaya yang lebih besar, para orang tua juga merasa lebih leluasa (tidak "sungkan") melakukan kontrol terhadap kualitas pembelajaran anak-anaknya di sekolah. Dan memang untuk

⁴⁶ Astar Hadi, "Pendidikan atau "Pasar" pendidikan?", *Loc Cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Pertimbangan orang tua yang menyekolahkan anaknya dengan biaya lebih besar lebih terkait dengan pertimbangan kualitas, jaminan masa depan lebih baik, namun tidak menutup kemungkinan ada yang karena pertimbangan prestise. Lebih bangga kalau anaknya bisa diterima di sekolah yang biayanya lebih besar, dengan asumsi lebih berkualitas, bisa bersaing dengan para siswa yang ekonominya lebih mapan. Bahkan di masyarakat desa, mereka rela menjual ladangnya untuk membiayai anaknya sekolah ke kota.

menyelenggarakan pendidikan, melalui proses pembelajaran di sekolah yang lebih berkualitas membutuhkan biaya yang tidak 'sedikit'. Karena butuh penanganan lebih serius, kegiatan yang variatif, dengan kurun waktu yang terbatas.

Semua pihak pasti menyadari besarnya biaya pendidikan tersebut, tinggal persoalannya siapa yang harus menanggung? Pemerintah atau masyarakat? Ini yang hingga kini menjadi kontra versi. Di negara-negara yang sudah maju, termasuk tetangga kita Singapura dan Malaysia, pemerintah memang yang bertanggung jawab semua biaya pendidikan, tidak membebankan kepada masyarakat. Bagaimana dengan Indonesia, apakah pemerintah juga mampu menanggung semua biaya pendidikan? Kalau dilihat secara riil, dengan membandingkan anggaran sektor non pendidikan, gaji para "pejabat" dan anggota legis latif yang sangat fantastis, kita mampu, tergantung kemauan pemerintah yang berkuasa.

Harapan seperti itu mulai ditunjukkan pemerintah kita

sekarang, melalui menteri pendidikan nasional Bambang Sudibyo dalam pernyataan hari Kamis, 22 Januari 2009 telah menerapkan kebijakan larangan bagi pendidikan dasar negeri (SD dan SMP) untuk membebankan biaya kepada siswa (wali siswa) dalam bentuk apapun, seiring dengan telah direalisasikan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003, yakni minimal 20% anggaran pendidikan dari APBN, dan telah menjadi kebijakan pendidikan nasional yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Kebijakan seperti ini bisa jadi merupakan pilihan rasional yang terbaik buat pemerintah (*rational choice*), sebuah kebijakan yang adaptif dengan tuntutan masyarakat (*bounded rationality*), bila tidak, maka pamor pemerintah semakin jatuh di mata masyarakat, akibat lebih lanjut masyarakat tidak akan memilih lagi pada pemilu 2009 ini.

Bagaimana dengan lembaga pendidikan swasta? Pemerintah memang juga memberi subsidi kepada lembaga pendidikan swasta, termasuk lembaga pendidikan agama maupun lembaga pendidikan umum

di lingkungan pondok pesantren, namun tidak sebesar di lembaga pendidikan negeri. Sehingga pemerintah tidak bisa membatasi besaran biaya yang harus dibebankan ke siswa di lembaga pendidikan swasta, menyerahkan sepenuhnya ke pengambil kebijakan (yayasan atau kiai) di sekolah swasta masing-masing.

Sudah tentu, sebagai aktor, pengambil kebijakan, korporat (yayasan) atau individu (kiyai di pondok pesantren) akan menghitung secara cermat antara "*cost*" dan "*benefide*". "Profit" tetap menjadi perhatian utama, dengan memperhatikan dimensi sosial (kekuatan ekonomi masyarakat sekitar). Disinilah aktor (individu atau korporat) akan menentukan kebijakan yang menurutnya paling rasional buat dirinya, buat lembaganya, yang sudah tentu juga bagi masyarakat (*bounded rationality*), dengan harapan di masa mendatang lembaga pendidikan yang dikelola tetap diminati, bahkan semakin diminati masyarakat. Dintandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang

menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan tersebut.

Bagi masyarakat santri, pilihan mereka terhadap pendidikan umum di pondok pesantren, atau pendidikan umum yang berbasis nilai-nilai agama di beberapa kota, sekalipun harus mengeluarkan biaya lebih besar, adalah merupakan pilihan yang rasional, yang terbaik buat orang tua dan anaknya, dengan harapan agar kelak anaknya memiliki kepribadian (afektif), kecerdasan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik) lebih baik, terjadi mobilitas vertikal yang lebih baik.

PENUTUP

Teori pilihan rasional (*rational choice*) yang dikemukakan oleh James Coleman dan teori "rasional berikat" (*bounded rationality*) memang tidak pernah menyinggung persoalan pendidikan, namun bagi kami amat tepat untuk dijadikan alat analisis bagi *perilaku memilih* pendidikan dan penetapan kebijakan oleh aktor (individu maupun korporat) dalam bidang pendidikan, terutama di kalangan masyarakat santri. Meskipun para tokoh tersebut (terutama James

Coleman) tidak mempersoalkan latarbelakang (alasan) dan kadar rasionalitas perilaku aktor (individu dan korporat), namun kajian di kalangan masyarakat santri ini sengaja kami mencoba mengungkap. Mengingat kenyataannya, para aktor (individu dan korporat) tersebut juga melakukan tindakan-tindakan adaptasi ("rasional berikat"). Sudah tentu itu semua diharapkan agar semua pihak (aktor maupun masyarakat) memperoleh keuntungan (tidak semata-mata berupa materi, tetapi yang lebih penting lagi adalah "kualitas pendidikan", bahkan prestise), serta agar terjadi mobilitas sosial lebih baik.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat santri semakin rasional dalam memilih lembaga pendidikan, sehingga sudah saatnya para pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia bisa membuka hati, supaya dualisme penyelenggaran pendidikan segera bisa dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ager, Ben. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, penerjemah Nur

Hadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, cetakan kelima 2008)

Coleman, James. "Rationality and Society", *Rationality and Society*, 1989.

-----*Foundations of Social Theory*, (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Pres, 1990).

-----."The Design of Organization and the Right to Act", *Sociological Forum* 8: 527-546, (1993a).

-----."The Rational Reconstruction of Society", *American Sociological Review* 58: 1-15, (1993b).

Goldthorpe, J. "The quantitative Analysis of large-scale datasets and rational action theory: for a sociological alliance". *European Sociological Review* 12.(1998).

Hadi, Astar. "Pendidikan atau "Toko" Pendidikan?", <http://astarhadi.blogspot.com/2007/12/Pendidikan-atau-toko-pendidikan.html>. 28 Desember 2007

-----."Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theori*): sebuah telaah Ekonomi-

- Politik".
<http://astarhadi.blog.com/2403548/>. 11 Desember 2007.
- Hedstrom, Peter. Stern, Charlotta. "Rational Choice and Sociology". *Journal the New Palgrave Dictionary of Economics*. (Second Edition, 2008;).
http://id.wikipedia.org/wiki/James_McGill_Buchanan
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1978/simon-autobio.html
http://www.shafferfineart.com/james_coleman_biography.htm
- Juoro, Umar. "Rasionalitas dan Adaptasi dalam Ekonomi Politik", *KOMPAS*, Opini, Rabu 18 Agustus 2004
KOMPAS, 13 Juli 2007
- Morgan, S. "Modelling Preparatory Commitment and Non-Repeatable Decisions: Information-Processing, Preference Formation and Educational Attainment". *Rationality and Society* 14, (2005)
- Ritzer, George. Goodman, Douglas
J. Teori Sosiologi Moderen, Alih Bahasa Alimandan, (
- Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi ke-6 2008)
- .
- Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Penerjemah Nur Hadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, Cetakan Pertama 2008).
- SBM, Nugroho. "Memahami Perilaku Politik lewat Teori Ekonomi Politik", *SUARA MERDEKA*, Wacana, Kamis, 16 September 2004
- Surbakti, Ramlan. *Catataan Kuliah teori-teori social Kontemporer*, Senin, 12 Januari 2009